

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dampak dari krisis ekonomi pada tahun 1998 yang dialami oleh Indonesia mendorong pentingnya penerapan *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Salah satu faktor pendukung terwujudnya *Good Governance* adalah adanya akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggungjawab atas akuntabilitas publik serta merupakan salah satu ukuran keberhasilan (kinerja) pemerintah daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Renyowijoyo (2008: 175) “Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya”. Laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah harus berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif yaitu, andal, relevan, dapat dibandingkan dan dapat dipercaya.

Banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh daerah-daerah akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik di Indonesia dapat berkualitas. Salah satu bukti konkritnya adalah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintah (SAP). PP No. 24 tahun 2005 mengatur akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) dan merupakan PP transisi karena UU keuangan negara mengamanatkan pengakuan dan pengukuran pendapatan dengan basis akrual selambat-lambatnya lima tahun sejak UU disahkan. Dalam perkembangannya PP No. 24 disempurnakan lagi dengan terbitnya PP No. 71 tahun 2010.

Dalam perbandingannya, ruang lingkup PP No. 24 tahun 2005 meliputi SAP berbasis kas menuju akrual yang terdiri dari 11 PSAP (pernyataan standar akuntansi pemerintahan) dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Sedangkan ruang lingkup PP No. 71 tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual yang terdiri dari 12 PSAP dan berlaku sejak tanggal ditetapkan 22 oktober tahun 2010 dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang SAP diatas dapat membantu para pengelolaan keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sehingga dapat memenuhi akuntabilitas publik.

Badan Pemeriksa Keuangan memaparkan laporan keuangan 52 daerah provinsi, kabupaten, dan kota di lima daerah Indonesia Timur, yakni Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat Sebagian besar laporan keuangan dari kelima provinsi itu, untuk pemeriksaan tahun 2010, dinilai buruk. Pada penilaian tahun 2009, seluruh daerah di Maluku Utara masuk kategori tak wajar. Sebaliknya, tahun 2009 seluruh kabupaten dan kota di Gorontalo mendapatkan penilaian wajar dengan pengecualian. Hanya dua daerah di Indonesia Timur yang kinerja keuangannya mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian, yakni provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Gorontalo (sumber: www.bpk.go.id).

Kabupaten Gorontalo adalah satu-satunya daerah di Provinsi Gorontalo yang mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK. Hal ini lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Gorontalo yang hanya mendapatkan penilaian wajar dengan pengecualian dari BPK.

Dari fenomena di atas saya ingin meneliti apakah penilaian wajar tanpa pengecualian yang didapatkan oleh Kabupaten Gorontalo dikarenakan daerah tersebut sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dalam pengelolaan keuangannya.

Dari peneliti sebelumnya seperti oleh Permana (2011) dengan hasil Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di dinas Kota Bandung. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Pakaya (2011) pada kanwil Kementerian

Hukum dan Ham Provinsi Gorontalo dengan hasil penelitian penerapan SAP yang meliputi akuntansi neraca , laporan realisasi anggaran dan catatan atas laporan keuangan berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah yaitu buruknya Kualitas laporan keuangan di Wilayah Indonesia Timur dan hanya dua daerah di Indonesia timur yang mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian salah satunya Kabupaten Gorontalo (sumber: www.bpk.go.id).

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah apakah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Gorontalo.

1.4 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD di Kabupaten Gorontalo

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat teoritis

penelitian ini adalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang SAP dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu dapat menjadi acuan dan perbandingan untuk penelitian sejenis dimasa mendatang

1.5.2 Manfaat praktis

penelitian ini adalah sebagai bahan tambahan literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan.